

PERAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DI KAMPUNG TANJUNG ISUY KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT

Surya Abraham S L T¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur peran apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam memberdayakan industri kecil, dan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan Industri kecil di Kabupaten Kutai. wawancara mendalam dengan narasumber, dari unsur perajin, pengusaha tenun ikat, dan pemerintah daerah; studi pustaka;

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Dalam Pemberdayaan Industri Kecil di Kampung Tanjung Isuy Kabupaten Kutai Barat adalah berupa dukungan dan pembinaan dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan; pemberian bantuan alat produksi; pemberian pinjaman modal; mengikutsertakan dalam pameran; dan perlindungan hak paten. Hambatan dan tantangan dalam pengembangan tenun ikat yang dihadapi para perajin, yaitu keterbatasan modal, kesulitan memperoleh bahan baku, dan kesulitan dalam pemasaran.

Kata Kunci : Peran, Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pemberdayaan, Industri Kecil.

PENDAHULUAN

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional Indonesia, oleh sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri masa depan.

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kutai Barat merupakan salah satu upaya menciptakan “masyarakat Kutai Barat yang sejahtera dan produktif”. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memainkan peran sebagai penggerak/pendorong dan *entrepreneurship* guna

¹ Mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : abraham.tobing@gmail.com

memacu pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri dan jasa (tersier) menciptakan peluang berusaha bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri dan industri-industri lainnya, di mana KUMKM dapat berfungsi subkontraktor, yang kuat dan efisien bagi usaha besar. Perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan/kampung dan industri berbasis sumber daya alam (SDA), terutama pertanian, kehutanan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat, tentu akan memberikan peluang bagi tumbuh dan kembangnya KUMKM.

Sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, pemberdayaan usaha kecil yang menjadi tugas DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan secara terus menerus dengan selalu memperhatikan aspek-aspek, diantaranya adalah:

- a. Penguatan aspek permodalan, efisiensi proses, spesifikasi mutu, manajemen pemasaran;
- b. Pengembangan pola kemitraan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan membutuhkan;
- c. Bantuan fasilitas diberikan secara selektif dalam bentuk sarana dan permodalan.

Kampung Tanjung Isuy Penulis pilih sebagai objek penelitian bagi penulis karena pertimbangan terdapat 98 unit Usaha Kecil Menengah (UKM) (Sumber: Profil Industri Kecil & Menengah (IKM) 2013), 39 unit di antaranya bergerak pada usaha keterampilan membuat berbagai jenis produk hasil kerajinan tangan yang berbahan dasar dari serat tanaman liar, sejenis palem. Yang dikenal oleh masyarakat Tanjung Isuy tanaman Doyo.

Berdasarkan data tersebut maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat memprioritaskan usaha tenun ulap doyo di Kampung Tanjung Isuy. Terlebih karena Kampung Tanjung Isuy merupakan sentra kerajinan tenun ulap doyo yang mengolah tanaman doyo untuk dijadikan kerajinan tangan.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi di kampung Tanjung Isuy maka DISPERINDAGKOP & UKM memberikan bantuan modal, pengadaan peralatan tenun serta program pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM adalah suatu sistem dalam manajemen usaha yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu produksi, dalam rangka meningkatkan daya-saing produk yang dihasilkan.

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat terhadap pemberdayaan pengrajin kerajinan doyo di kampung Tanjung Isuy sangat dibutuhkan, karena usaha ini memerlukan dukungan dalam hal teknologi tepat guna, permodalan usaha, pemasaran produk, organisasi,

manajemen, serta aspek lain seperti pelatihan-pelatihan dan monitoring dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dari uraian diatas yang sudah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan, yaitu 1) Apa saja peran DISPERINDAGKOP & UKM dalam pemberdayaan industri kecil di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat?; 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya peran DISPERINDAGKOP & UKM dalam pemberdayaan industri kecil di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat.

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan judul “ Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM dalam pemberdayaan industri kecil di kampung tanjung isuy kecamatan jempang kabupaten kutai barat.

LANDASAN TEORI

Peran

Menurut Veithzal Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa harapan sebagaimana penanggung peran berperilaku.

Menurut J. Kaloh (2009:7) adalah fungsi pemerintah meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat, membuat pedoman atau ketentuan kepada masyarakat dan pemberdayaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dalam konteks ini, peran pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Fasilitator

Istilah fasilitasi digunakan untuk menyatakan suatu bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat. Dikalangan bisnis, konsep fasilitasi seringkali digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengenal kebutuhannya. Dengan ungkapan lain, fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program, atau organisasi untuk mempermudah proses belajar. Dalam konteks pembangunan, istilah fasilitasi biasa dikaitkan dengan pola pendampingan, pedukungan atau bantuan dalam masyarakat.

Pengertian fasilitasi, Secara harfiah merujuk pada upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah.

2. Pemerintah sebagai Regulator

Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan, sehingga mempermudah industri kecil dalam mengembangkan usaha. Selaku regulator, pemerintah berfungsi menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif dalam keberlangsungan investasi sesuai peraturan perundang-undangan

3. Pemerintah sebagai Motivator

Fungsi Pemerintah Daerah sebagai motivator adalah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada para pelaku-pelaku industri kecil, agar usaha-usaha yang ada diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Pemberdayaan Industri Kecil

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensial yang ada secara evolutif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Industri Kecil

Secara sederhana dalam kamus besar ekonomi (Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, 2007: 252) dijelaskan bahwa definisi industri adalah kegiatan ekonomi dengan memproses atau mengolah bahan-bahan atau barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin, untuk menghasilkan barang (jadi) atau jasa.

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaan atau harga jualnya.

Ardyla Nugroho (2006:15) menyatakan industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum definisi mengenai industri bermacam-macam namun pada dasarnya pengertiannya tidak jauh berbeda satu sama lainnya.

Menurut Dwiwinarno (2008 dalam Haryadi, 2010), ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha.

Promosi

Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan.

Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan (*to inform*), membujuk (*to persuade*), atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga (Simamora, 2003:285).

Pembangunan ekonomi kerakyatan

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Menurut Peet & Harmwick (2009), pembangunan adalah upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang. Hal ini berarti pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik, menjadi suatu kondisi yang lebih baik.

Menurut Mubyarto (2008), sistem Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguh pada ekonomi rakyat Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring yang menghubungkan– hubungkan sentra – sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong adalah menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini secara tidak langsung menjadi hakikat hubungan antara peneliti dan responden, selain itu metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah Peran pemerintah sebagai fasilitator sarana bimbingan pendampingan, pelatihan, dan penyediaan bantuan permodalan melalui kemitraan bank, koperasi, dan lembaga lainnya. Peran pemerintah sebagai regulator kebijakan-kebijakan dalam mempermudah dunia usaha dan keberlangsungan iklim usaha yang meliputi aspek perizinan usaha, kesempatan usaha, hak cipta dan lain-lain untuk kelompok pengrajin. Peran pemerintah dalam bantuan promosi dan pemasaran hasil produksi industri kecil lokal. dan faktor pendukung dan penghambat peran Disperindagkop & UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kutai Barat dan situs penelitian yakni Disperindagkop & UKM Kabupaten Kutai Barat dan Pelaku Usaha Kampung Tanjung Isuy. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif, dalam bukunya Matthew B.Miles dan Michael Huberman (2014 : 14) melalui 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Industri Kecil di Kampung Tanjung Isuy

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM sebagai pembina dan pengembang usaha kecil dalam menjalankan tugasnya, berperan sebagai fasilitator atau penyedia layanan dalam memberikan pelatihan – pelatihan yang bertujuan meningkatkan usaha kecil yang ada di Kampung Tanjung Isuy.

Pada umumnya sumber daya yang dimiliki oleh pelaku industri kecil masih relatif sederhana dan bersifat tradisional, terutama di sektor pengetahuan produksi dan manajemen sehingga pelaku industri sulit lepas dari kesulitan – kesulitan untuk menuju tahap lepas landas.

SDM dari pelaku industri kecil masih sangat minim pengetahuan dan pemahaman akan manajemen industri, namun dengan adanya seminar dan pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh DISPERINDAGKOP dapat membuat para pelaku industri kerajinan menjadi lebih mengerti bagaimana menjalankan usaha dan mengelola usaha tersebut agar hasil usaha yang mereka tekuni dapat menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Pelaku industri kecil diberikan pelatihan – pelatihan serta seminar pengetahuan dan wawasan teknis dan non

teknis mengenai kerajinan Ulap Doyo dan membuat desain yang menarik dan mengikuti tren mode jaman sekarang sehingga kerajinan ini tidak terpaku dengan model yang begitu-begitu saja namun lebih variatif.

Mengenai bantuan permodalan melalui kemitraan dengan lembaga permodalan seperti bank. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memberikan penyuluhan mengenai tata cara pembuatan proposal bantuan finansial kepada pihak bank di beberapa kesempatan seminar yang diadakan di kampung Tanjung Isuy. Sebagaimana diketahui bahwa faktor modal merupakan salah satu faktor fundamental dalam upaya peningkatan kemampuan industri dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat bersaing di pasar bebas. akses permodalan untuk pengembangan industri kecil melalui program penyertaan sangat terbuka sehingga hampir semua pelaku usaha yang mengajukan proposal bantuan penyertaan modal usaha mendapatkannya.

Peran DISPERINDAGKOP & UKM dalam memfasilitasi dalam hal membuka peluang usaha bagi para pengusaha industri di Tanjung Isuy salah satunya ialah kebijakan pemberian bantuan alat produksi bagi para pelaku usaha, upaya ini diyakini agar pengusaha industri kecil mampu melakukan ekspansi bisnis yang tentu akan menyerap jumlah tenaga kerja lokal di Kampung Tanjung Isuy.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kab. Kutai Barat telah menjalankan tugas untuk mengembangkan dan membuka peluang usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bantuan alat produksi dapat diterima dengan baik oleh pelaku industri dalam menjalankan usahanya.

Pemberian bantuan alat ini dimaksudkan agar membantu untuk memudahkan para pengrajin dalam memproduksi anyaman ulap doyo. Hal ini dimaksudkan agar jumlah produksi ulap doyo yang dihasilkan dapat terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena peningkatan produktifitas ini sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan pasar baik lokal, regional maupun nasional.

Pemerintah sebagai regulator berperan sangat strategis dalam proses pengambilan kebijakan – kebijakan yang dapat mempermudah proses tumbuh dan kembangnya industri kecil. Pemerintah berfungsi menjaga iklim investasi dan lingkungan usaha tetap kondusif. Untuk itu, pemerintah diharuskan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek strategis diantaranya ijin usaha, promosi, kemitraan, kesempatan usaha, dukungan kelembagaan dan lain-lain.

Salah satu pos penting dalam proses tumbuh dan kembangnya usaha yakni masalah perijinan. Perijinan menjadi hal yang mutlak diperlukan oleh pelaku industri kecil di Kutai Barat karena hal ini menjadi syarat utama jika ingin mengajukan bantuan permodalan yang telah disebutkan di atas. Maka peran DISPERINDAGKOP & UKM dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha adalah pengurusan sertifikat ijin usaha.

pengurusan surat ijin usaha di DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Kutai Barat sangat mudah dikarenakan syarat yang diperlukan sangat sederhana. Yaitu hanya membutuhkan fotokopi dari sertifikat Ijin Membangun Bangunan tempat usaha atau slip lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahunan.

Selain itu perlunya adanya kebijakan dalam melindungi kekayaan intelektual produk hasil dari pelaku industri lokal dari pesaing hasil kerajinan serupa baik dari luar daerah maupun luar negeri. Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting artinya, terutama masyarakat barat serta masyarakat industri maju yang memelopori perkembangan sistem hukum hak atas kekayaan intelektual ini sangat menaruh perhatian dalam menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup kekayaan intelektual baik yang berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan karya kekayaan intelektual lainnya adalah merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga, biaya dan pikiran. Hasil kreativitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan diatas, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, hasil karya pada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukannya, menciptakan, maupun mendesain. Oleh karena itu sudah sepatutnya kepada mereka diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk Hak Eksklusif atas karya yang dilahirkannya.

Maraknya pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya cipta khususnya kerajinan tradisional di Indonesia disebabkan karena masih lemahnya penegakan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual. Meskipun di Indonesia telah di berlakukan UU tentang Hak Cipta, tetapi dalam sistem perundang-undangan kita, mendaftarkan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban bagi pencipta karya tersebut, atau dengan kata lain, UU Hak Cipta tidak memberikan kewajiban kepada para pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya. sehingga banyak pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya, yang dampaknya bisa mempersulit pembuktian secara formal jika timbul sengketa di kemudian hari. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam masyarakat tradisional yang mempunyai sifat komunal biasanya ciptaan yang telah dihasilkan seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain, sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati hak ciptanya secara eksklusif atau bahkan ciptaannya itu disalahgunakan oleh anggota masyarakat untuk keuntungan pribadinya. Meskipun ada Undang-Undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, tetapi itu belum memberikan dampak yang nyata terhadap pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya. Ini dikarenakan UU tersebut tidak diiringi dengan usaha pemerintah untuk melakukan sosialisasi guna terciptanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang cukup. Karena pada kenyataannya perlindungan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat lemah, ini terbukti dari banyaknya kasus pembajakan terhadap produk yang sudah dilindungi dengan hukum hak atas kekayaan intelektual.

Dalam usaha meningkatkan pemasaran ulap doyo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengikutsertakan pelaku usaha dalam pameran. Produk-produk yang dipamerkan harus mempunyai produk yang spesifik dan unik sehingga mempunyai nilai jual bila dipamerkan. Dari usaha tersebut diharapkan dapat menjadi penopang pemenuhan kebutuhan pelaku usaha ulap doyo, sehingga kelangsungan produksi yang baik menjadi hal yang pokok dimana strategi melalui proses produksi ditinjau dari besarnya modal, bahan baku dan tenaga kerja yang kemudian melalui strategi pemasaran yang dapat ditempuh dengan sosialisasi usaha kerajinan ulap doyo yang unik dan spesifik serta penetapan harga dan promosi ke wilayah lain yang memang merupakan wilayah pemasaran produk ini.

Di bidang pemasaran, banyak pelaku industri kecil kampung Tanjung Isuy yang hanya memasarkan hasil produksi kerajinan mereka untuk pasar lokal saja. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan SDM para pelaku industri terutama di bidang pemasaran produk. Selama ini pelaku industri kerajinan lebih pandai memproduksi barang dibanding memasarkan. Untuk meningkatkan kemampuan pemasaran, informasi pasar merupakan suatu keharusan. Dalam pengembangan usaha diperlukan usaha promosi ke pasar yang baru serta penyediaan informasi pasar yang akurat bagi pelaku industri kecil.

Adapun beberapa kegiatan pameran yang diikuti oleh pengusaha di Kampung Tanjung Isuy dengan bantuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

1. Pameran INACRAFT

Pameran ini dilaksanakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) bekerjasama dengan Mediatama Binakreasi Jakarta di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 21 – 25 april 2010 yang merupakan pameran kerajinan terbesar di Indonesia dan menjadi agenda resmi yang dilaksanakan setiap tahun. Pameran ini bersifat internasional karena mengundang pembeli dari luar negeri

2. Pameran Indonesia Exp

Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 September 2010 di Jakarta Convention Center (JCC) jakarta yang diselenggarakan oleh PT. Debindo Multi Adhiswasthi

peran DISPERINDAGKOP & UKM dalam memberikan pelayanan promosi dan informasi dampaknya sangat nyata dirasakan bagi pelaku industri kecil di Kampung Tanjung Isuy Kabupaten Kutai Barat karena dapat membuka peluang pasar yang lebih luas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Industri di Kampung Tanjung Isuy

Faktor penghambat dari peran DISPERINDAGKOP & UKM dalam pemberdayaan Industri kecil berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan adalah adanya kesenjangan pembangunan daerah utama terutama di wilayah

terisolir, sehingga menyebabkan belum meratanya pembangunan di bidang Industri, Dagang, dan UKM.

Hal tersebut disebabkan oleh antara lain kondisi geografis di mana Kabupaten Kutai Barat berada di posisi bagian hulu sungai Mahakam, yang sebagian besar wilayahnya dominan pengunungan dan lahan berupa hutan yang masih perawan. Begitu pula prasarana, sarana dan jasa penunjang aksesibilitasnya masih rendah sehingga masih sulit untuk mencapai dari dan menuju daerah tersebut. DISPERINDAGKOP & UKM juga memiliki faktor pendukung dalam melakukan pemberdayaan kepada para pelaku industri kecil. Diantaranya adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menempatkan pengembangan dan pemberdayaan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi *leading sector* dalam arah pengambilan kebijakan umum pembangunan daerah RPJMD 2011-2016. Artinya adalah Pemerintah kabupaten Kutai Barat mempunyai *Political Will* untuk membangun kabupaten ini berbasis ekonomi kerakyatan. Terbukanya akses pasar untuk komoditi unggulan daerah serta makin pesatnya kerjasama antar negara, terutama dalam konteks ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) dan APEC juga akan menciptakan peluang ekspor. Begitu pula dengan mulai pulihnya perekonomian nasional tentu akan membuka peluang usaha baru. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan keanekaragaman permintaan masyarakat Kutai Barat. Selain itu berkembangnya teknologi informasi komunikasi yang cepat telah menciptakan sistem perdagangan yang berbasis elektronik. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan aktivitas usahanya dengan lebih efisien tanpa batas ruang dan waktu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan mengenai Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM di Kampung Tanjung Isuy Kabupaten Kutai Barat, maka dapat disimpulkan bahwa Peran yang telah dilakukan oleh DISPERINDAGKOP & UKM dalam pemberdayaan industri kecil di Kampung Tanjung Isuy dilakukan dengan bimbingan pelatihan untuk memberikan inovasi pada produk hasil kerajinan agar desainnya lebih variatif, peningkatan efisiensi produksi dan konsistensi mutu pada hasil produksi serta pemberian bantuan permodalan berupa pinjaman modal usaha dengan bunga ringan dengan syarat ringan dan juga pemberian bantuan alat produksi guna peningkatan hasil produksi.

Adapun Peran yang diambil oleh DISPERINDAGKOP & UKM sebagai regulator dengan memberikan kemudahan bagi dunia usaha melalui permudahan proses pembuatan surat ijin usaha yang menjadi syarat mutlak untuk mengajukan proposal bantuan penyertaan modal usaha serta dalam upaya perlindungan atas kekayaan intelektual karya asli Kampung Tanjung Isuy maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah mendaftarkan kerajinan anyaman ulap

doyo ke Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selain itu juga DISPERINDAGKOP & UKM ikut dalam mempromosi produk dan informasi mengenai pasar yang tepat untuk memberi kontribusi dan nyata yang telah dirasakan langsung oleh pelaku industri kecil karena makin banyaknya pasar yang meminati produk kerajinan khas Kampung Tanjung Isuy.

Faktor penghambat dalam peran DISPERINDAGKOP & UKM dalam pemberdayaan industri kecil di Kampung Tanjung Isuy yaitu adanya kesenjangan pembangunan daerah utama terutama di wilayah terisolir, sehingga menyebabkan belum meratanya pembangunan di bidang Industri, Dagang, dan UKM. Hal tersebut disebabkan oleh antara lain kondisi geografis di mana Kabupaten Kutai Barat berada di posisi bagian hulu sungai Mahakam.

Koordinasi dan keterpaduan pembangunan instansi - instansi terkait masih belum tercapai. peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut masih kurang memadai, bahkan belum direncanakan dengan sistematis.

Hal yang menjadi faktor pendukung peran Disperindagkop & UKM ialah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menempatkan pengembangan dan pemberdayaan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi sektor utama pendapatan daerah dalam arah pengambilan kebijakan umum pembangunan daerah RPJMD 2011-2016. Serta terbukanya akses pasar berkat pasar bebas AFTA dan APEC yang memungkinkan peningkatan akan permintaan produk industri kerajinan lokal Kampung Tanjung Isuy.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut membuka luas pangsa pasar baru bagi pengusaha industri kecil untuk menjamah calon konsumen yang berjarak jauh dari lokasi produksi.

Saran

Selanjutnya berdasarkan data-data yang telah disajikan dan kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan. Pertama, Pemerintah hendaknya meningkatkan atau paling tidak mempertahankan frekuensi pemberian pembinaan dalam usaha pengembangan industri kecil baik berupa bantuan pelatihan oleh instruktur berpengalaman maupun modal usaha. Selain itu Pemerintah perlu lebih sering melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaku usaha industri kecil menengah di Kampung Tanjung Isuy agar hasil-hasil pelatihan dan seminar atau semacamnya benar-benar dapat berjalan dengan hasil yang semestinya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM haruslah bisa lebih berinovatif dalam memberikan program pembinaan. Disperindagkop & UKM dapat memberikan penyuluhan seperti diantaranya dengan melakukan pelatihan pemasaran melalui internet karena teknik pemasaran melalui media ini baru dilakukan oleh sebagian kecil pengusaha di Kampung Tanjung Isuy. Hal ini disebabkan sebagian besar pengusaha di Kampung Tanjung Isuy belum menguasai cara menggunakan internet. Untuk itu maka para pengrajin kerajinan kain tenun ikat di Kampung Tanjung Isuy hendaknya terus melakukan inovasi

produksi dan diversifikasi desain dan motif agar dapat bersaing dengan produk sejenis yang ada di wilayah Kutai Barat maupun Kalimantan Timur.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keberhasilan pembangunan industri tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders industri selain itu keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan sistem pelaksanaan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya pengrajin kain tenun ikat doyo sebagai objek pembangunan industri Kabupaten Kutai Barat khususnya di Kampung Tanjung Isuy.

Daftar Pustaka

- Anoraga, P. dan D. Sudantoko. 2002. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Glendoh, H.S. 2001. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 3 No. 2 Maret: 1-13.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat", dalam Bestari, Nomor 20 tahun VIII Agustus-Desember 1995.
- Moh. Nazir. Ph. D, 2003. Metode Penelitian, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prof. Dr. S. Nasution, M.A. Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta 2004.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2016.